

“Kancut” Ajeg Bali

Seorang karib dari Jakarta curhat, ia bersama keluarganya pulang ke Bali. Saat urusan keluarganya usai, mereka jalan-jalan, menikmati Bali sekalian mengajarkan anak-anaknya tentang *kelawahan* Bali, termasuk betapa ramahnya orang Bali. Seperti kebanyakan orang Jakarta yang jika ke pura tidak menggunakan pakain adat, cukup *senteng* saja, dan entah kenapa mereka lupa sedang berada di Bali yang seharusnya pakain adat lengkap sudah disiapkan. Hari itu, naas bagi mereka. Maksud hati ingin *tangkil*, malah terser di “negeri sendiri” hanya karena tidak menggunakan pakain adat. Pecalang di pura itu bergeming, meski mereka sudah menjelaskan sampai memperlihatkan KTP segala, hanya untuk membuktikan mereka beragama Hindu.

Curhat sedhinya itu bukan soal diusir, tetapi para pejalan itu tak melakukan apa-apa kepada wisatawan, apalagi wisatawan asing yang juga menggunakan *senteng* saja. “Mungkin mereka bayar mahal masuk pura”, batin si bapak. Pengalaman getir keluarga Bali itu mungkin bukan hal baru, dan tidak semua pejalan juga pasti tidak sesangar itu. Tapi fakta sosial bahwa terdapat ambiguitas dalam memperlakukan orang yang *tangkil* ke pura begitu nyata. Standar ganda ini

membuka celah merembesnya sikap permisif yang dengan mudah dimakan. Beberapa kali wisatawan asing duduk di atas padmasana atau buhkan kencing disumber air petirihan, mereka dan orang Bali pada umumnya diam. Hanya bereaksi sesaat, seperti kawanan lebah, *nigeri-nyung* ramat, setelah itu hening kembali.

Sikap ambigu ini terlahir telanjang diperlihatkan, seperti anjing yang ekornya naik saat menyala *nyama pedidi*, tetapi *mekancut* saat berhadapan dengan orang lain dan dengan orang luar, lebih-lebih yang menawarkan keuntungan dolar, jika investor menawarkan investasi. Keluarga Bali dari Jakarta itu mungkin dipersepsikan “orang luar”, tetapi mereka *nyama pedidi*, bukan? Saya sendiri memiliki pengalaman empirik tentang kasus ini, lebih bih dekat pada dunia pragmatis, bukan lagi “orang dalam” dan “orang luar”.

Siang menjelang sore itu saya Tebejak maet di seputaran jalan Teuku Umar-linam Bonjol-Sunset Road. Banyak orang di jalanan berteriak-teriak. Yang lainnya sambil berlari-lari kecil. Ada yang menontom, ada pula yang menghindari kerumunan itu. Esoknya dalam berita teri-nyata kejadian kemarin itu konflik antar ormas. Memang,

sejak reformasi, ormas di Bali juga tumbuh subur, melanjutkan ormas-ormas sejenis yang sejak 1980an juga telah terkenal. Lalu momentum politik 1998 yang ditandai monceranya nama pe-calang, kran lahirnya ormas di Bali deras meluber.

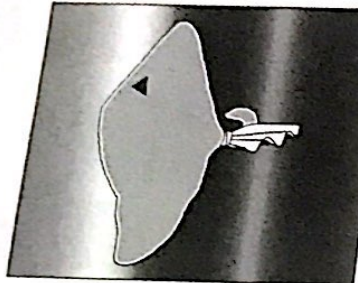
Meski saya tak pernah tahu visi dan misinya, ormas di Bali makin mengaut baik secara politik, dan terutama secara ekonomi. Beberapa di antaranya malah seperti berhadapan-hadapan dalam penguasaan sumber daya terhindarkan. Belum lagi ketika ormas-ormas ini harus bersaing dengan pendatang luar Bali yang entah bagaimana kisahnya juga bisa sama-sama eksis. Kabar tak sedap, ormas-ormas ini juga ada bekungnya. Entahlah. Mungkin saja ada ormas Bali yang bertujuan memberdayakan dan melestarikan nilai dan budaya, tapi itu pasti jumlahnya minor. Persepsi publik sudah kadung terbentuk bahwa ormas-ormas itu cenderung tidak lunak.

Kini, ormas makin keras, tidak saja kepada orang Bali sendiri, tetapi juga orang luar. Meski faktor penguasaan sumber daya lebih dominan, tetapi gerakan ormas juga menyasar ke soal etnis, suku dan agama. “Umpan matang” dengan dalih sebagai orang Bali yang tak boleh terasing di rumahnya sendiri ini juga akhirnya digoreng sekelompok orang, misalnya ada ok-

num yang ingin populer lalu mengkapitalisasi isu itu sehingga terkesan eksklusif. Karena itu tak heran, misalnya di media sosial muncul postingan bernada jengonik dan ingin mendominasi. Dan penyukanya bisa ri-nasi, karena emosi primordial-buan dikulik. Orang luar tak boleh “berkuasa”, tapi sayangnya orang dalam tak ditingkatkan kualitasnya. Kalau sudah begini, politik identitas seolah sah dibangun dengan cara kekerasan budaya, kekerasan simbolik, hingga kekerasan fisik.

Menanggapi arus keter-bukaan yang membuat Bali makin tak terarah, pernah di suatu masa, konsep Ajeg Bali diajukan menjadi katalisator semua persoalan tersebut. Saya tidak akan membahas isu Ajeg Bali karena sudah banyak dibahas. Bahkan sudah ada bukunya. Menyoal kembali, sepertinya akan terasa sedikit masalahnya isu ini terus “hidup”, kadang-kadang mengganggu juga jika sedikit sedikit Bali merasa terancam, Ajeg Bali seolah menjadi pem-betarnya. Bahkan bertindak sedikit keras akan dimaafkan jika atas nama Ajeg Bali. Padahal era cforianya sudah lama berlalu. Ada pro dan kontra mengiringi perjalanannya. Maksud gerakan ini pasti sangat baik, tentu saja. Tak terbantahkan.

Lalu siapa yang ajeg atau semakin ajeg dari gerakan Ajeg Bali? Remang-remang. Jika



yang dimaksud pemilik media tertentu menempatkan keajegan Tapi gerakan ini, mungkin ya. gitu. Hidup dari iklan, advertorial, mengajar rating. Ini ada-lah lapangan empuk bagi media saat Ajeg Bali dilemparkan ke publik. Saat emosi keagamaan dimainkan dengan menyisipkan fanatisme primordial, wacana sasinya bisa dengan ragam cara, salah satu yang mengis utung besar, ya oleh media, entah cetak, elektronik, massa maupun online.

Sayangnya kini tak ada yang peduli dari ampas-ampas cforia Ajeg Bali itu. Koperasi Sima-krama Bali entah bagaimana nasibnya kini. Tak sedikit pedagang Bali gulung tikar saat menjual bakso ayam dan babi, yang sengaja “diciplakan” ha-nya untuk menggerem pesatnya kaum urban yang menguasai

I Nyoman Yoga Segara



perbaksan. Agar rasional, perlu penyedap emosional, misalnya orang Hindu tak makan bakso sapi. Meski kini ditempelkan juga emosi keagamaan dengan tagline yang lebih serius, *ajegan sadka*, tetap saja warung-warung itu sunyi. Belum lagi masyarakat yang terbiasa dengan budaya lokalnya “dipaksa” menjual “makanan asing”. Misalnya, orang Klungkung yang terbiasa mengolah *serombotan*, lalu harus menjual soto mie, mie ayam dan sejenisnya. Tak nyambung, dan mereka babak belur. Orang Bali itu budaya makanannya *lawar*, *babi guling*, *ares*, *serombotan*, *sate langgan*, *jukat gondra*, dlsb. Langan demi dan untuk Ajeg Bali, gen kebudayaannya dipaksa berubah.

Masalahnya kini, bagaimana *kancut* orang Bali harus tetap tegak dalam menghadapi kompleksitas persoalan dengan penuh *wiwaka*, bukan emosional semata apalagi pragmatis-patalis. Mari kita berefleksi, orang Bali ternyata tidak memiliki *positioning* yang *powerful*, apalagi *bargaining* ketika berhasil memberikan lebih 90% suara untuk Jokowi-Amin pada Pil-pres 2019, tetapi pasrah saja ketika diberikan hanya satu Menteri, itupun bukan posisi kelas premium.

*Penulis: Antropolog
HIDN Denpasar